

RENCANA KERJA 2025



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara perlu menyusun Rancangan Awal Rencan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra PD, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis PD dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2025. Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencan Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara untuk tahun 2025.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**



ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731025 199304 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan perencanaan kerja. Perencanaan terdiri dari dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan rencana itu sendiri (plan). Dalam menetapkan sasaran, masyarakat sebagai stake holder diharapkan menjadi pemain utama. Partisipasi masyarakat dan kemampuan untuk menangkap dan menerjemahkan tuntutan publik menjadi faktor penting dalam proses perencanaan.

Sejak awal triwulan I (pertama) Tahun 2020 hingga saat ini, hampir seluruh negara di dunia telah terjangkit penyebaran pandemic covid 19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia cukup besar dengan terganggunya mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi khususnya pada sektor Transportasi yang berdampak meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun Anggaran 2025, yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tapanuli Utara dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Ruang lingkup Rencana Kerja adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan dalam 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada dan tujuan pembangunan yang realistis yang dapat dicapai. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara 2025-2026 yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024, yaitu “Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung SDM yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”, pencapaiannya didukung dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumberdaya Lokal
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui pelatihan Tenaga Kerja, pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

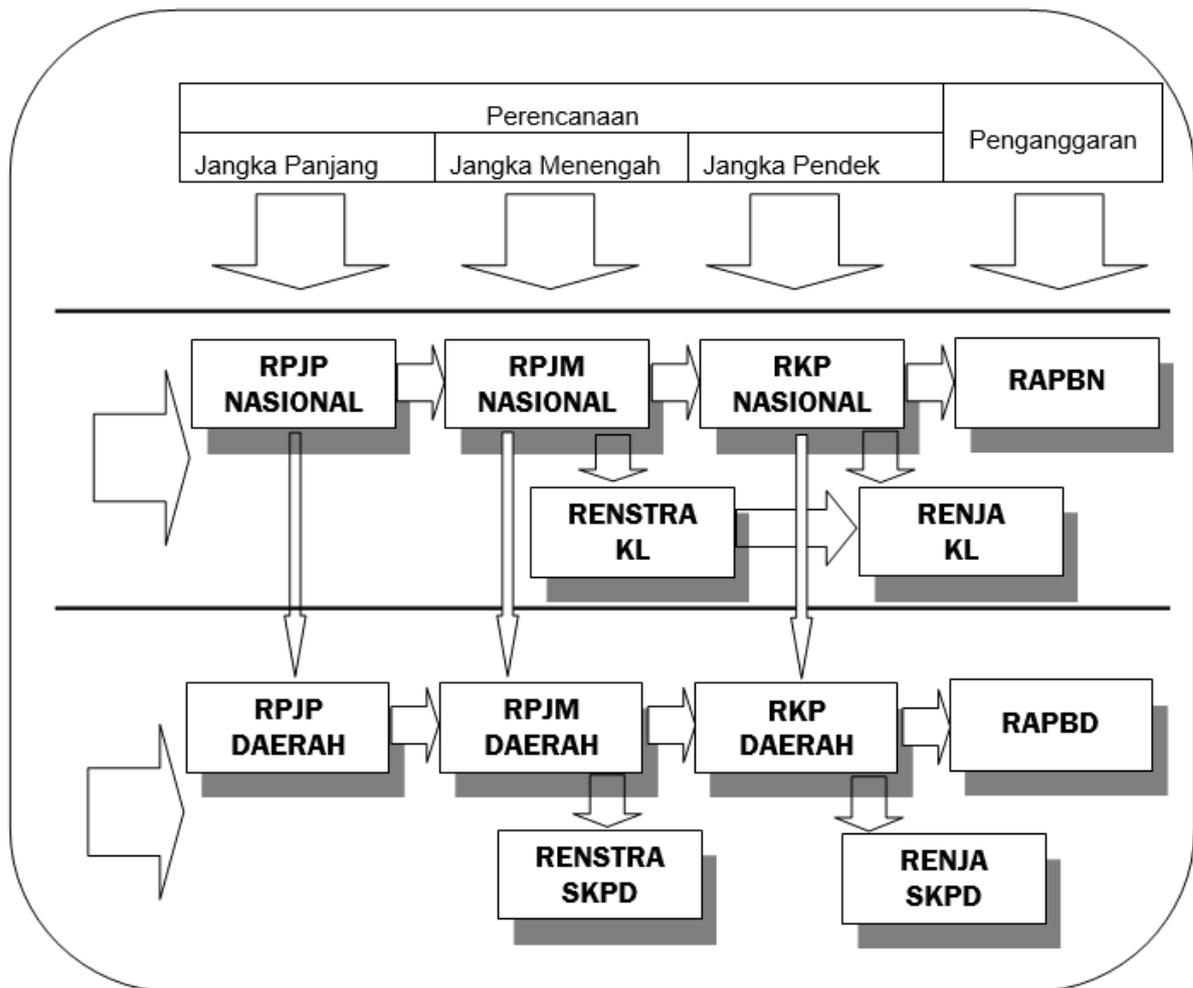
Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara mengampu misi ke 6 (enam) yang erat kaitannya dengan Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara nomor : 14 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, disusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD.

Hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada diagram alir di bawah ini :



1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang- undang Nomor 7 Drt Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo Undang - undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, jo Undang - undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini dimaksudkan untuk membuat Rencana Kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara 2020-2024 dan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli

Utara 2020–2024 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang Perhubungan tahun 2025;
2. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di bidang Perhubungan tahun 2025;
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dan menjelaskan kedudukan Renja terhadap dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021

- 2.2. Analisis Pelayanan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
Mengemukakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
Mengemukakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan kondisi umum, permasalahan/hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.
- 2.4. Review Terhadap RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024

Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman kepada Renstra Tahun 2025-2026. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target, sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja, outcome yang dikaitkan dengan capaian sasaran.

Tingkat capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja yang meliputi indikator input, output, outcomes, sedangkan untuk indikator kinerja benefit dan impact belum dikembangkan pengukurannya. Beberapa penyebab belum dapat dikembangkannya pengukuran antara lain : Kesulitan untuk menetapkan secara tepat apa yang mesti diukur, penampakan indikator benefit dan impact adalah hasil integrasi dari banyak kegiatan bahkan lebih dari satu program dengan jangka waktu melebihi satu tahun, disamping belum tersedianya media atau sistem pengumpulan data kinerja.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Utara

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target s/d Tahun 2024	
					Target Renja 2024	Realisasi Renja 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
	Perhubungan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianyan Alat Tulis Kanotr	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BAngunan LAInnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BAngunan LAInnya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
			Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota									
			Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100 persen	15 unit	15 unit	100 persen
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	8 lokasi	8 lokasi	100 persen
			Pengujian Berkala Kendraan Bermotor									
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	750 set	750 set	750 set	750 set	100 persen	750 set	750 set	100 persen
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan Bermotor	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100 persen	4 unit	4 unit	100 persen
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen

		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota									
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100 persen	1 tahun	1 tahun	100 persen
		Program Pengelolaan Pelayaran									
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabunan Sungai dan Danau									
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100 persen	1 tahun	1 tahun	100 persen

2.2. Analisis Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2026, Untuk Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2024 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap).

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	IKK	Satuan	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2024	2025	
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum											
a	Jumlah Penumpang Bus dan Mini Bus		Orang	2.870.000	2.898.700	2.927.687	2.956.963	2.856.930	2.852.200	2.927.678	2.956.963	
b	Jumlah Penumpang Kapal Danau		Orang	22.600	23.052	23.913	23.983	55.750	58.854	23.913	23.983	
c	Jumlah Penumpang Pesawat Udara		Orang	200.000	203.052	206.045	209.135	1.450.365	300.537	206.045	209.135	
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum		Unit	311	1.326	1.342	1.360	1.670	1.097	1.342	1.360	
3	Jumlah Pelabuhan Udara/Danau/Terminal Bis											
a	Jumlah Pelabuhan Udara		Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	
b	Jumlah Pelabuhan Danau		Unit	2	3	3	3	3	3	3	3	
c	Jumlah Terminal Bis		Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Jumlah Angkutan Darat		Unit	1.600	1.610	1.620	1.600	1.550	1.632	1.620	1.600	
5	Lama Pengujian Kelaikan Angkutan Umum (KIR)		Menit	30	30	30	30	30	30	30	30	
6	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu		Unit	325	350	375	400	8	21	400	425	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

a. Tingkat Kinerja Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada publik, Dinas Perhubungan diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pengembangan objek Transportasi di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan memanfaatkan sarana prasarana dan SDM yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara maka diharapkan institusi ini dapat meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kinerja dan pelayanan yang baik.

b. Permasalahan/ Hambatan

Dalam upaya pelayanan perhubungan ditemukan berbagai hambatan/permasalahan yang timbul, diantaranya :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**

Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah terbatasnya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah, sehingga survey lapangan dan monitoring pelaksanaan kegiatan sangat terbatas. Masalah lain adalah kurangnya ASN yang memiliki kompetensi sehingga berpengaruh terhadap pelayanan perhubungan yang kurang optimal. Strategi Pemecahan masalah: Perlunya penambahan Biaya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, dan peningkatan kualitas SDM agar pelaksanaan pelayanan administrasi umum pemerintahan berhasil dalam menunjang pelaksanaan program yang ditetapkan. Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah terlalu minimnya dana perbaikan maupun pengadaan sarana dan prasarana kantor. Sarana kantor yang masih jauh dari cukup diakibatkan terbatasnya dana untuk program ini. Melihat kondisi kenaikan standar harga-harga barang kebutuhan kantor. Strategi pemecahan masalah : perlunya pemberi wewenang memberikan perhatian yang serius kepada sarana dan prasarana aparatur khususnya pemberian kenaikan anggaran dalam APBD TA 2025 agar sarana dan prasarana kantor lebih memadai. Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah kurangnya dana, sehingga volume pelatihan maupun sosialisasi peningkatan SDM terhadap Aparatur di dalam daerah ataupun di luar

daerah terbatas. Strategi pemecahan masalah : perlu penambahan dana agar volume atau jumlah aparatur yang ikut serta dalam sosialisasi, pelatihan maupun Bimtek yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta bertambah, baik di dalam daerah maupun di luar daerah sehingga dapat menambah kualitas dan ilmu pengetahuan aparatur. Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah minimnya dana APBD untuk peningkatan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah minimnya anggaran yang ada pada Dinas Perhubungan, sehingga penyediaan sarana prasarana perhubungan sangat terbatas, dan juga ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang perhubungan masih terbatas sehingga kinerja pelayanan perhubungan tidak maksimal. Hal itu juga diakibatkan oleh minimnya dana yang ditampung di APBD. Strategi pemecahan masalah : agar kedepannya Pemkab Tapanuli Utara lebih meningkatkan jumlah anggaran pada dinas perhubungan sehingga penyediaan sarana prasarana perhubungan dapat terpenuhi serta kualitas SDM yang kompeten dapat ditingkatkan.

- **Program Pengelolaan Pelayaran**

Masalah yang mungkin timbul terhadap program ini adalah minimnya SDM yang kompeten dalam bidang angkutan sungai danau dan penyeberangan sehingga pengelolaan pelayaran khususnya angkutan danau belum dapat dikelola secara maksimal. Strategi pemecahan masalah : Agar kedepannya perlu peningkatan kualitas SDM yang kompeten dalam bidang angkutan danau. Sehingga pelayanan pengelolaan pelayaran angkutan danau dapat terlaksana secara optimal.

c. Dampak Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara terhadap Pencapaian Visi/Misi Bupati Tapanuli Utara

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi kepala daerah Tapanuli

Utara dalam RPJMD 2019-2024 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian misi ke 6 (enam) yaitu ; **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan mengacu pada Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup”**, dan misi ke 8 (delapan) yaitu : **“meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem E-GOVERNMENT”**.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dipastikan ada tantangan dan peluang. Salah satu tantangan dalam peningkatan pelayanan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanui Utara diantaranya belum terpenuhinya ketersediaan Fasilitas Keselamatan laulintas, kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan berlalulintas, serta masih terbatasnya ASN yang kompeten di bidang perhubungan sehingga sangat mempengaruhi kinerja terhadap pelayanan di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

2.4. Review Terhadap Rencana Kerja (Renja) RKPD

Berbagai program kegiatan telah ditampung pada kegiatan 2024. Namun demikian masih banyak kegiatan yang telah tertuang pada RENSTRA 2025-2026 yang tidak tertampung pada anggaran 2024 maupun 2025. Hal ini disebabkan masalah dana yang terbatas, permohonan dari masyarakat yang tidak dianggarkan sebelumnya. Sehingga pada kegiatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2025 terdapat kegiatan yang baru yang tidak terdapat di RKPD. Namun diharapkan program yang tidak dapat ditampung di APBD dapat dianggarkan di APBD Provinsi maupun APBN.

Tabel 2.3
Review Terhadap RKPD Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Keterangan
Nama Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Nama Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				4.560.650.769,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tertangani			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tertangani		4.309.371.769,00	
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.494.400,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.497.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.998.200,00	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.999.200,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.753.833.725,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perhubungan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	492 Orang/bulan	3.698.082.225,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.755.200,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perhubungan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.996.300,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah		95.219.156,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	3.485.800,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	18.989.350,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	2.076.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	11.717.406,00	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	3.710.600,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	55.240.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		383.061.688,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	58.820.400,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	323.241.288,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		59.762.800,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perhubungan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	56.841.800,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Pemeliharaan	10 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Pemeliharaan	10 Unit	2.921.000,00	

		Peralatan dan Mesin Lainnya					Peralatan dan Mesin Lainnya			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Cakupan Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan		243.799.000,00	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Terlaksananya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		25.000.000,00	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		0,00	
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0 Unit		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C		8.790.000,00	
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	2 Unit		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dinas Perhubungan	Berkembangnya Sarana dan Prasarana Terminal	2 Unit	8.790.000,00	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		40.000.000,00	
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	0,00	

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Unit		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Unit	40.000.000,00	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	0,00	
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		170.009.000,00	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	1 Laporan		Monitoring dan Evaluasi Zona Selamat Sekolah (Zoss)	Dinas Perhubungan	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	1 Laporan	0,00	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	170.009.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Cakupan Pelayanan Keselamatan Pelayaran			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Cakupan Pelayanan Keselamatan Pelayaran		7.480.000,00	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian		7.480.000,00	

							Pelabuhan Sungai dan Danau			
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit	7.480.000,00	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara

Tujuan dan Sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Perhubungan	1. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	a. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan Program Pengelolaan Pelayanan
		2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	b. Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target dan realisasi dari Sasaran Strategis pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025
1.	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	a. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas	Persen	25,00%		0,00%	25%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	b. Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	65		0,00%	67

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 tertuang dalam program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk Tahun 2025.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan
- Program Pengelolaan Pelayaran

Rencana Kerja program dan kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja untuk Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut (terlampir).

RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja						Anggaran Tahun 2025
			Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	DINAS PERHUBUNGAN							5.199.180.292,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4.424.771.456,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							17.486.500,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	7.492.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	4.996.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	4.998.500,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.921.151.260,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	492	Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	492	Orang/bulan	3.860.873.810,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	55.279.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	4.998.250,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								88.699.196,00

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	3.999.996,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.708.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2.500.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	17.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	7.498.200,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	44.993.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								343.669.200,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	55.230.800,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	287.438.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53.765.300,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	50.870.900,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	2.894.400,00

	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								764.408.836,00
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								25.000.000,00
	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	25.000.000,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								231.433.600,00
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	85	Unit	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	85	Unit	200.000.000,00
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	70	Unit	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	70	Unit	31.433.600,00
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C								10.000.000,00
	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C		Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	2	Dokumen	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	2	Dokumen	10.000.000,00
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								19.995.236,00
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan	19.995.236,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								447.980.000,00
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	60.020.000,00
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1	Laporan	387.960.000,00

	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								30.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Laporan	30.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								10.000.000,00
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau								10.000.000,00
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	1	Unit	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1	Unit	10.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* merupakan komitmen dari penyelenggara ditingkat atas sampai bawah, dimana semua kebijakannya disusun dalam kerangka yang jelas dan terletak pada bingkai ideologi dan konstiuante dalam suatu wilayah yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun Rancangan Awal Rencan Kerja (Renja) Tahun 2025 berdasarkan pada peraturan dan perundang- undangan yang berlaku. Dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang termuat dalam susunannya membutuhkan mewujudkan semua kegiatan perlu mendapatkan prasarana dan sarana guna mendukung kegiatan dimaksud sehingga semua kegiatan yang tersusun dalam kerangka kerja pada Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencan Kerja (Renja) Tahun 2025 yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan bagian penyelenggara pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara agar dapat terakomodir sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga semua kegiatan dimaksud sekiranya dapat bermanfaat bagi pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA**



**ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19731025 199304 1 001**